

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA **DINAS KESEHATAN**

UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Jalan Kesehatan Nomor 10, Telepon 021-21201123, Faksimile 021-21202016 Website: agddinkes.jakarta.go.id Email: agddinkesdkijakarta@yahoo.com JAKARTA

Kode Pos: 10160

····	SATUAN KERJA	:	Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta		
	NOMOR SPK		11/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/I/2020		
	TANGGAL SPK	:	31 Desember 2019		
	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 119) Bulan Januari 2020				
SURAT PERINTAH	SUMBER DANA Anggaran APBD Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2020				
KERJA (SPK)	DASAR SPK 1. Surat Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor: 06/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/I/2020 Tanggal 27 Desember 2019 Perihal Undangan Permintaan Penawaran Harga 2. Surat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor TEL. 3255/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Perihal Surat Penawaran Harga. 3. Berita Acara Evaluasi Negoisasi Teknis Dan Harga Nomor: 08/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/I/2020 Tanggal 30 Desember 2019 Perihal Pengadaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 119) Bulan Januari 2020				
SPK ini mula	i berlaku efektif terhitung keseluruhan pekerjaan s	sejak tar sebagaim	ggal 1 Januari 2020 dan penyelesaian ana diatur dalam SPK ini		

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 (Satu Bulan) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian	Satuan	Vol	Harga satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Akses Internet SPGDT				
	Internet Dedicated, Astinet 5 Mbps	Link	1	5.455.000	5.455.000
	IP PBX Sistem, fitur ACD, terintegrasi dengan no 119	unit	1	4.818.100	4.818.100
	SIP gateway	unit	1	2.272.500	2.272.500
	Voice Recording Sistem	unit	1	2.727.127	2.727.127
	Rack server & device	unit	1	909.091	909.091

PPK	B
PENYEDIA	۲

2	Sistem Layanan SPGDT 9 Seat Dinker	S			
	Integrasi Akses SPGDT 119	set	9	772.700	6.954.300
	Integrasi Algoritma SPGDT Dinkes	set	9	727.300	6.545.700
	Integrasi Aplikasi Contact Center Agent	set	9	727.300	6.545.700
	Integrasi IP PBX	set	9	727.300	6.545.700
	Integrasi Voice Recording	set	9	681.600	6.134.400
	License Software Call Center inbound dinkes	set	9	818.200	7.363.800
	License Software Call Center outbound dinkes	set	9	818.200	7.363.800
	Antivirus Licence	set	9	90.900	818.100
	Login Agent ID	set	9	545.500	4.909.500
	Login Aplikasi Agent	set	9	772.700	6.954.300
	Login Aplikasi Reporting	set	9	136.400	1.227.600
	Reporting Call Recording	set	9	136.400	1.227.600
	Reporting Voice Recording	set	9	136.400	1.227.600
	Login Ekstension	set	9	90.900	818.100
·	Headset Binoural Agent	Unit	9	136.382	1.227.438
3	Add On 60 Seat (lokasi RS Swasta & RSUD)				,
	Integrasi Aplikasi Contact Center Agent	set	31	727.300	22.546.300
	Antivirus Licence	set	31	90.900	2.817.900
	Login Agent ID	set	31	545.400	16.907.400
4	Akses Internet Dedicated 40 Mbps				
	Internet Dedicated 40 Mbps	link	1	34.710.194	34.710.194
				TOTAL PPN 10%	159.027.250 15.902.725
	Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah			TOTAL + PPN	15.902.725

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

PPK PENYEDIA

Selain tunduk kepada ketentuan umum SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Pejabat Pembuat Komitmen



NIP 197801032006041000

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



GM Local Government Services
Divisi Government Service

	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PPK	X
PENYEDIA	20



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN

UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Jalan Kesehatan Nomor 10, Telepon 021-21201123, Faksimile 021-21202016
Website: agddinkes.jakarta.go.id Email: agddinkesdkijakarta@yahoo.com
JAKARTA

Kode Pos : 10160

Lampiran Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK)

Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

1.02.08.003 Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-

Kegiatan : Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT)

Nilai Total Harga : Rp.174.929.975,00

Terbilang Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh

Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

DPA : 008/DPA/2020 Tanggal 02 Januari 2020

Sumber Pendanaan : APBD Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Tahun Anggaran : 2020

Kode Rekening : 5.2.2.10.07

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh tehadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

- 4. HARGA SPK
 - a. PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 5. JADWAL

Waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada hari kalender dan melakukan koordinasi dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan sesuai spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2020 sejak SPK ini diterima oleh Penyedia atau dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari

PPK	()v
PENYEDIA	7

2020 (1 (Satu) bulan). Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan addendum SPK.

b. PEMERIKSAAN

Pemeriksa pekerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut yang kerjakan oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak sesuai dengan pesanan, maka pekerjaan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan SPK.

7. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh penerima hasil pekerjaan.

B. PEMBAYARAN

Pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan.
- b. Pembayaran dilakukan dengan sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan 100%.
- c. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf b diatas akan dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia secara sekaligus melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi indonesia Tbk.
- d. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan keuangan daerah.

9. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban – kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

10. PENYELESAIAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PPK PENYEDIA